

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*. Media Sarana Press. Jakarta, 2002.
- Affandi, M. Joko. *Beberapa Pokok Pikiran tentang Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Kepegawaian Negara, Jakarta. 2007.
- Gaffar, Affan. *Paradigma Baru Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2006
- Hikam, A.S. *Pemilihan Kepala Daerah dan Demokratisasi Lokal di Indonesia*. Yayasan Obor. Jakarta. 2002
- Ismail, Mohamad . *Aktualisasi Pelayanan Prima Dalam Kapasitas PNS sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat*, Mandar Maju, Bandung. 2003.
- Jefferson, Rumajar *Otonomi Daerah: Sketsa. Gagasan dan Pengalaman*, Media Pustaka, Manado, 2006.
- Mohamad, Ismail, *Aktualisasi Pelayanan Prima Dalam Kapasitas PNS sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat*, Mandar Maju, Bandung. 2003.
- Prihatmoko, Arifin. *Menakar Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Penerbit SIC. Surabaya.2005.
- Sedarmayanti. *Manajemen Sumber Daya Manusia Pemerintahan*. Grasindo. Jakarta. 2005
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983
- Widjaja, HAW. *Administrasi dan Pemerintahan di Era Otonomi Daerah*, Rineka Cipta. Jakarta, 2008.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1976 Tentang Pegawai Negeri Yang Menjadi Pejabat Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 01/SE/1977 Tentang Permintaan dan Pemberian Cuti PNS

<http://www.bkn.go.id/cuti> diluar tanggungan negara.Diakses Senin 10 Februari 2014

<http://news.detik.com/read/2014/05/05/170317/2573706/10/soal-gugatan-uu-asn-hakim-mk-minta-pns-jaga-netralitas>/Diakses Kamis 23 Oktober 2014